PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BARU

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
(2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
(2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
    a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
    b. Inspektorat Daerah Provinsi;
    c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
    d. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2023

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

JALAN D.I. PANJAITAN NITI MANDALA DENPASAR BALI , TELEPON (0361) 225091,
WEBSITE : www.diskopukm.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI

NOMOR : 050.4/077.1/DISKOP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN 2023

Menimbang :

a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikTahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 183.Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)

8. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Menghimpun materi-materi yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
b. Mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
c. Menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAH PROVINSI BALI

I WAYAN MARDIANA
NIP. 19620317 199003 1 013

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI
NOMOR :050.4/077.1/DISKOP/2022
TANGGAL 3 Januari 2022

TENTANG,

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Provinsi Bali.
Ketua	:	Sekretaris Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Provinsi Bali.
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Provinsi Bali.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. 3. Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
8. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
9. I Gusti Ayu Ngurah Darmawati, S.E., Analis Perencana
10. Ida Bagus Made Puja Sanjaya, Pengelola Program dan Kegiatan
11. I Gusti Agung Angga Nuriana, S.T., Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
12. Ni Luh Nyoman Ayu Tirta Wiratni, S.E. Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI

I WAYAN MARDIANA
NIP. 19620317 199003 1 013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023. Rancana Kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun berdasarkan atas Rancangan Akhir Renja dan masukan-masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi Bali.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Dan berharap pula dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I Wayan Ekadina
NIP. 19701211 199803 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Diagram..... iii
Bab I Pendahuluan..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu..... 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali..... 51
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 53
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 53
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 55
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 55
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 56
3.3. Program dan Kegiatan 56
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 59
Bab V Penutup 60
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan-jabatan Struktural

Tabel 2.4. Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Tabel 2.5. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019

Tabel 2.7. Target belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran

Tabel 2.8. Target Belanja Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran

Tabel 2.10. Pengukuran Kinerja

Tabel 2.11. Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel

Tabel 2.12. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Wirausaha dari Pelaku UMKM yang Tangguh dan Mandiri

Tabel 2.13. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2021

Tabel 2.14. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021

Tabel 2.16.1. Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Bali

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Hubungan Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi (Pasal 38 Permendagri 86 Tahun 2017). Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah (PD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (Renstra PD).

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 sehingga pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2023 memenuhi Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 3565 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangakat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Dan sebelum Penetapan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah harus melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir;
f. Penetapan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 juga mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Provinsi Bali khususnya dan nasional pada umumnya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Gubernur Bali 56 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali memiliki rincian tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan

Provinsi serta penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

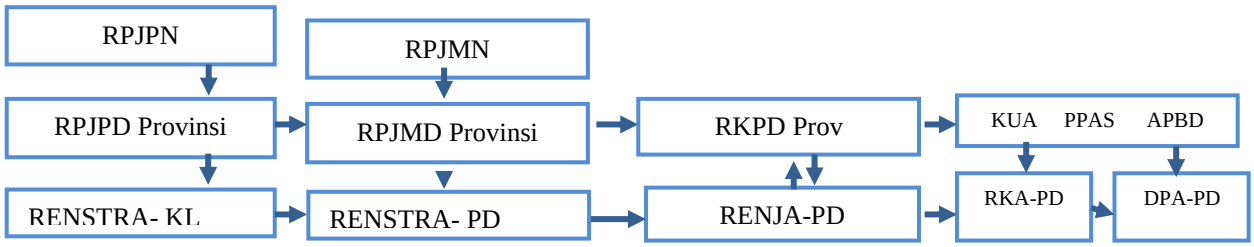

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
20) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
21) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023) ;
22) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

23) Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ;
24) Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Sebagaimana diuraikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 wajib sinkron dengan RKPD Tahun 2023 maka maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 :

1) Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023;
2) Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam pembangunan daerah;
3) Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah :

1) Menjabarkan Perubahan Renstra Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2023;
2) Merancang program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023;
3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Meanengah Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Perubahan Renstra Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan** Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, memuat telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan

kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu:

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, pada bagian ini tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2021)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 (tahun n-1) disajikan dalam tabel 2.6, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (tolok ukur menggunakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap dinyatakan sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah:

a. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :
   - Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah

- Melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi :
   - Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
   - Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
   - Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
   - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
   - Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data per Juni 2021, komposisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	18
3	Strata 1	43
4	Diploma III	2
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	9
7	SLTP / Sederajat	-
8	SD	1
Total		**73**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan dukungan Sumber Daya Manusia dari jumlah SDM dan tingkat Pendidikan sangat memadai dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	49
3	Golongan II	7
4	Golongan I	-
Total		**73**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Dari tabel 2.2 menunjukan dengan Jumlah pegawai yang memiliki Golongan IV sebanyak 17 sudah berada pada Puncak Karir dan jumlah pegawai dengan Golongan III sebanyak 49 rata – rata memiliki Ijasah S1 dan S2 dan Golongan II , 7 orang dengan ijasah SMA

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
	JABATAN STRUKTURAL	
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
	JABATAN FUNGSIONAL	
1	Arsiparis	1
2	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1
3	Calon Pengawas Koperasi	5
Total		**22**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Dari tabel 2.3 menunjukan bahwa hampir semua Jabatan Struktural Administrator dan Jabatan Fungsional dengan Sub Koordinator telah terisi dan beberapa Jabatan Fungsional telah ada dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali .

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Administrasi	41
2.	Sopir	8
3.	Tenaga Teknis/Lapangan	-
4.	Penjaga Malam	9
5.	Satpam (Pihak Ketiga)	-
6.	Cleaning Service dan Tukang Kebun (Pihak Ketiga)	11
Total		**69**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Dari tabel 2.4 jumlah pegawai Non PNS sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang sangat berperan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi , karena sudah ditugaskan sesuai dengan keahliannya , mengingat PNS yang pensiun terus meningkat setiap tahun .

Tabel 2.5
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	1066 m2
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	3 unit
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10 unit
4	Kendaraan Operasional Roda 2	7 unit
5	Meja Kerja	92 buah
6	Kursi Kerja	84 buah
7	Komputer	30 unit
8	Printer	24 unit
9	Filling Cabinet	24 unit
10	Rak kaca/kayu	23 unit
11	Lemari besi/Kayu	22 unit
12	AC	50 unit
13	Zise	7 Unit
14	Kursi Tamu	15 unit
15	Alat Kantor lainnya	1 unit

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (2021)

Dari Tabel 2.5 menunjukan , bahwa belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali terutama komputer , ruang rapat dan fasilitas pendukung ruang rapat .

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubenur Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali periode 2018-2023 dengan Visi : "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI "** Implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam mewujudkan Bali Era Baru dengan mengemban 1(satu) misi yaitu misi yang ke 17 yaitu : Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali , dengan Tujuan Berkembangnya Perekonomian Berbasis Budaya Lokal dengan Indikator Persentase KUMKM Menuju Digital dengan Sasran Meningkatnya Pusat- Pusat Perekonomian Kecil dan Menengah Krama Bali dengan Indikator jumlah pusat–pusat perekonomian lokal berbasis Koperasi.

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023 dengan menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Tujuan pada Perubahan Renstra yaitu Meningkatnya Kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan sasaran terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel dan Meningkatnya Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan seperti berikut:

Tabel 2.7.
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.855.952.250,00**	**11.725.071.149,00**	**91,20**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**Persen**	**83**	**83**	**100**
a.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.148.786,00**	**91.432.296,00**	**85,33**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**Persen**	**83**	**83**	**100**
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.387.836,00	78.422.546,00	98,78	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	dokumen	3	3	100
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.978.990,00	7.279.700,00	81,07	Jumlah dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	3.374.760,00	-	-	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.374.900	2.007.050	59,47	Jumlah dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	100
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.374.730	-	-	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	100
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.242.910	985.000	18,79	Jumlah laporan capaian kinerja	laporan	4	4	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.414.660	2.738.000	80,18	Jumlah program yang dievaluasi	program	7	7	100
b.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.178.280.164**	**9.436.382.044**	**92,71**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**prsen**	**83**	**83**	**100**
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.157.693.234	9.424.070.886	92,78	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen	66	66	100
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.235.500	4.806.859	66,43	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	dokumen	12	12	100
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.135.310	1.513.600	70,88	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	dokumen	4	4	100

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.216.120	5.990.699	53,41	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	12	12	100
c.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.703.820**	**94.068.306**	**73,09**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**persen**	**83**	**83**	**100**
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.636.650	12.339.580	90,49	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang baik	layanan	1	1	100
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.487.170	51.173.979	79,36	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	layanan	1	1	100
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.850.000	10.487.497	48,00	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang baik	layanan	1	1	100
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	4.656.000	66,51	Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang baik	layanan	1	1	100
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.730.000	15.411.250	70,92	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	1	1	100
d.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**141.481.000**	**121.710.250**	**86,03**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**persen**	**83**	**83**	**100**
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.481.000	121.710.250	86,03	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	unit	17	17	100
e.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.297.634.752**	**1.182.776.520**	**91,15**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**persen**	**83**	**83**	**100**
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat yang baik	layanan	1	1	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.200.000	157.713.768	58,15	Jumlah layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	layanan	1	1	100

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					listrik yang baik				
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.024.434.752	1.023.062.752	99,87	Jumlah layanan penyediaan jasa pelayanan umum yang baik	layanan	1	1	100
f.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.002.703.728**	**798.701.733**	**79,65**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**persen**	**83**	**83**	**100**
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	779.379.736	621.324.456	79,72	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	jenis	2	2	100
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	17.240.000	34,48	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	jenis	3	3	100
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173.323.992	160.137.277	92,39	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	1	1	100
2.	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**210.094.650**	209.808.840	99,86	**Jumlah Koperasi yang Bankable**	**Koperasi**	64	64	100
a.	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**201.362.650**	**201.143.840**	**99,89**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Izin Usaha**	**Koperasi**	**64**	64	**100**
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	201.362.650	201.143.840	99,89	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	koperasi	10	10	100
b.	***Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	**8.732.000**	**8.665.000**	***99,23***	Jumlah Koperasi yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor kas	**Koperasi**	**5**	5	100
-	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor	8.732.000	8.665.000	99,23	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk	koperasi	1	1	100

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang				
3.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	130.404.106	**115.346.945**	**88,45**	**Jumlah Koperasi yang Sehat dan Berkualitas**	**koperasi**	**130**	**45**	**34,62**
a.	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**113.392.496**	**104.667.895**	**92,31**	**Jumlah Koperasi yang akuntabel**	**Koperasi**	**85**	**28**	**32,94**
-	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	58.682.148	50.215.348	85,57	Jumlah koperasi yang akuntable	Koperasi	*30*	*7*	23,33
-	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	54.710.348	54.452.547	99,53	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan prkoperasian	koperasi	*55*	*21*	38,19
b.	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**17.011.610**	**10.679.050**	**62,78**	**Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable**	**KSP/USP**	**45**	**17**	37,78
-	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	17.011.610	10.679.050	62,78	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable	KSP/USP Koperasi	*35*	*17*	48,57
4.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**60.074.198**	**58.738.398**	**97,78**	**Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh Sehat dan mandiri**	**KSP/USP Koperasi**	**130**	**63**	**48,46**

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	***Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi* Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**60.074.198**	**58.738.398**	**97,78**	**Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh Sehat dan mandiri**	KSP/USP Koperasi	130	63	48,46
-	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	48.000.248	47.390.498	98,73	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	KSP/USP Koperasi	*30*	*11*	36,67
-	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	12.073.950	11.347.900	93,99	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	KSP/USP Koperasi	*100*	*52*	52
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**312.664.305**	**293.861.990**	**93,99**	**Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN,BUMD/Swasta**	**Koperasi**	**126**	**33**	**26,19**
a.	***Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***	**312.664.305**	**293.861.990**	**93,39**	**Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN,BUMD/Swasta**	**Koperasi**	**126**	**33**	**26,19**
-	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	157.009.339	156.617.244		Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	koperasi	10	10	100
					Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	koperasi	10	10	100
					Jumlah koperasi yang mengikuti kemitraan	koperasi	10	10	100
					Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	koperasi	3	3	100
-	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	155.654.966	137.244.746		Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	koperasi	15	15	100

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah koperasi Nivo Provinsi yang baik kelembagaannya dan meningkat aset dan omstnya	koperasi	64	64	100
					Jumlah koperasi tenun yang aktif	koperasi	1	1	1
					Jumah koperasi yang datanya dimutakhirkan	koperasi	30	30	30
					Jumlah subak sebagai koperasi tani	koperasi	1	1	1
6.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**450.154.890**	446.845.380	**99,26**	**Jumlah UMKM yang Bankable**	**185 UMKM**	**185**	**1.744**	942,70
a.	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**450.154.890**	**446.845.380**	**99,26**	**Jumlah UMKM yang Bankable**	**185 UMKM**	**185**	**425**	229,73
-	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	450.154.890	446.845.380	99,26	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	50	325	650
					Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kesepakatan	4 UMKM	4	11	275
					Jumlah UMKM yang memperoleh izin usaha	50 UMKM	50	558	1.116
					Jumlah UMKM yang meningkat usahanya	32 UMKM	32	425	1.328
7.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.848.501.096**	1.715.656.597	**92,81**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**Persen**	83	83	***100***
a.	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**1.365.712.800**	**1.274.327.845**	***93,31***	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**Persen**	83	83	***100***

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.365.712.800	1.274.327.845	***93,31***	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen	14	14	***100***
b.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.802.060**	**20.821.081**	**91,31**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**Persen**	83	83	***100***
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.600	1.988.866	79,57	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	1	1	***100***
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.399.860	6.817.765	92,13	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	1	1	***100***
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.200.000	1.884.250	85,65	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	1	1	***100***
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	648.000	64,80	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	1	1	***100***
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.702.600	9.482.200	97,7***3***	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	13	1	***100***
c.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**277.270.892**	**243.135.827**	**87,69**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**Persen**	**83**	**83**	**100**
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	1	1	***100***
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000	16.354.391	33,72	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Layanan	1	1	***100***
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.770.892	225.781.436	9***9,13***	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	layanan	1	1	***100***
d.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.715.344**	**177.371.844**	**97,08**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**Persen**	83	83	***100***

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) /kegiatan (Output)				
					Narasi	Satuan	Kinerja		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.612.448	75.940.448	97,85	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	Jenis	2	2	***100***
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.950.000	11.478.500	76,***78***	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	Jenis	3	3	***100***
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.152.896	89.952.896	99,78	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	***100***
8.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**3.706.960.106**	**3.036.733.273**	***81,92***	**Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat**	50 0rang	**50**	***117***	***234***
a.	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.706.960.106**	**3.036.733.273**	**81,92**	**Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat**	**50 Orang**	**50**	**990**	***1.980***
-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.706.960.106	3.706.960.106	81,92	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	990 Orang	**990**	***873***	***88,18***

Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di tahun 2021 terdapat ***pada kegiatan / sub kegiatan pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*** dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun 2021 melaksanakan 8 (delapan) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yang didukung oleh dana sebesar Rp19.574.805.601,00 (Sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah). Realisasi dana dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp17.602.062.572,00 (Tujuh belas milyar enam ratus dua juta enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 89,92% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja ini berdasarkan atas laporan Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 yang didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelakasanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2021, dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp19.574.805.601,00 (Sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah) dengan rincian : Belanja Tidak Langsung Rp11.527.406.034,00 (Sebelas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tiga puluh empat rupiah) dan Belanja Langsung Rp 8.047.399.567,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enampuluh tujuh

rupiah). Prioritas utama Pemerintah pada tahun 2021 adalah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19.

Tabel 2.9
Target belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran

NO	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
		TOTAL (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Alokasi anggaran Tahun 2021	21.204.865.039,00	19.574.805.601,00
2	Belanja Barang dan Jasa	8.598.945.687,00	7.905.918.567,00
3	Belanja Pegawai	12.605.919.352,00	11.527.406.034,00

Tabel 2.10
Target Belanja Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran

No	Program	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 243.089.450	Rp.210.094..650
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 209.952.106	Rp. 130.404.106
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 127.476.198	Rp. 60.074.198
4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 583.089.605	Rp. 312.664.305
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 601.178.890	Rp. 450.154.890
7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	Rp. 3.392.755.626	Rp. 3.706.960.106
8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 16.047.323.164	Rp. 14.704.453.346

	TOTAL	**Rp. 21.204.865.039**	**Rp. 19.574.805.601**

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, Fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mmencapai rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *Good Govermance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

b. Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.11. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Berjalan			Kriteria	Kode
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1 Persentase peningkatan produktivitas koperasi	%	6,27%	7,68%	122%	Sangat Baik	
	2 Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	KUMKM	50	117	234%	Sangat Baik	
2 Meningkatnya wirausaha daripelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Rasio Kewirausahaan	%	8,38%	9,55%	113%	Sangat Baik	

1. Sasaran

a. Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

Tabel 2.12. Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Tata kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Professional dan Akuntabel

NO	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1.Persentase peningkatan produktivitas	8,35%	6,27%	7,68%	122%	7,50%	102%
		2.JumlahPengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	50	117	234%	-	-

Catatan :IndikatorJumlahPengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan diganti dikarenakan Indikator bersifat mikro dan lebih cocok menjadi indikator program dibanding kan untuk menjadi indikator sasaran Dinas

Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2021 **"Persentase peningkatan produktivitas koperasi"** adalah 7,68% dari target sebesar 6,27% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 122%. Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu

konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainya. Formula perhitungan produktivitas koperasi :

$$\frac{\text{Total SHU Koperasi}}{\text{Modal Koperasi}} \times 100\%$$

Tabel 2.13
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Sasaran Terwujudnya tata Kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
				Target	Realisasi	%		
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1. Persentase peningkatan produktivitas	8,35%	6,27%	7,68%	122%	Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam upaya mencapai pencapaian target : 1. Fasilitasi Koperasi untuk Mengakses LPDB 2. Rekomendasi Koperasi sebagai pelaksana Kredit Ultra Mikro (UMI)	Untuk lebih meningkatkan produktifitas koperasi, perlu difokuskan untuk mensejahterakan anggota koperasinya, yang dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan anggota koperasi yang bergerak di sektor UMKM maupun industri
		2.Jumlah Pengelola	-	50	117	234%	Dengan dukungan dana DAK Kegiatan pelatihan-	Dengan dukungan dana DAK yang

		KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi					pelatihan maupun bimtek dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberi manfaat lebih kemasyarakat maupun pengurus atau pengelola Koperasi	besar, pelatihan maupun bimtek dapat dilaksanakan lebih bervariatif sesuai kebutuhan masyarakat saat ini

Tabel 2.14
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SasaranTerwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
Terwujudnya tata kelolaorganisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	7,68%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang bankable	64	Menunjang
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	64	Menunjang
			Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	10	Menunjang

			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	5	Menunjang
			Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KoperasiSimpan PinjamuntukKoperasidengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	1	Menunjang
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	45	Menunjang
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel	28	Menunjang

			Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntable	7	Menunjang
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, sertaAkuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	21	Menunjang
			Pemeriksaan dan Pengawasan KoperasiSimpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel	17	Menunjang
			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	17	Menunjang

			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi	63	Menunjang
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	63	Menunjang
			Penilaian Permodalan, Kualitas AktivaProduktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	11	Menunjang
			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi nivoProvinsi yang Sehat	52	Menunjang
			Program Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitradengan BUMN, BUMD/Swasta	126	Menunjang

			Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengakses modal kelembaga keuangan dan bermitradengan lembaga lainnya	33	Menunjang
			Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, PenataanManajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitradengan BUMN, BUMD/Swasta	10	Menunjang
				Jumlah Koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	10	Menunjang
				Jumlah koperasi yang mengikuti kemitaan	10	Menunjang
				Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	3	Menunjang
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	15	Menunjang

			Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
				Jumlah koperasi nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	64	Menunjang
				Jumlah Koperasi tenun yang aktif	1	Menunjang
				Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	94	Menunjang
				Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	Menunjang
	JumlahPengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikat	117	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	117	Menunjang
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah PengelolaKoperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	990	Menunjang

			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian sertaKapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pesertadiklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten	873	Menunjang

Tabel 2.15
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	7,71%	8,38%	9,55%	113	9,57	99,79

Tabel 2.16
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan Mengkases program kementerian	7,71%	8,38%	9,55%	113	Faktor pendukung dalam pencapaian target adalah : 1. Akibat dampak pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kemudian beralih menjadi wirausaha baru 2. Pelatihan maupun pendampingan memanfaatkan Kerjasama dengan pihak pemerintah pusat maupun	Penumbuhan UMKM dilaksanakan dengan upaya memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan gojek atau dengan start-up lainnya dan berupaya memfasilitasi Mengkases

							Stakeholder, seperti Kemenkop maupun Gojek	program kementerian, Mendorong UMKM melakukan ekspansi melakukan penjualan melalu Online melalui marketplace

Tabel 2.17
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM	Rasio Kewirausahaan	9,55%	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Bankable	1.744	Menunjang
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	425	Menunjang
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	325	Menunjang

			Kemiskinan			
				Jumlah UMKM yang melalukan kerjasama/kesepakatan	11	Menunjang
				Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	558	Menunjang
				Jumlah UMKM yang Meningkat usahanya	425	Menunjang

2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinisi Bali, DPPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp19.574.805.601,00 (Sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah) Realisasi Anggaran Rp17.602.062.572,00 (Tujuh belas milyar enam ratus dua juta enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,92%. Dalam melakukan analisis efisiensi anggaran untuk setiap sasaran, untuk bagian yang disajikan dalam tabel 2.15 ini terkait dengan effisiensi anggaran untuk setiap sasaran. Sedangkan di tahun 2022 (tahun berjalan) target belanja/anggaran sebesar Rp 22.441.608.190,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai per Juni 2022 sebesar Rp.9.683.869.770,00 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 49,15 %.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang effisien menunjukan bahwa effisiensi anggaran telah mencapait ingkat tinggi ataupun sangat tinggi, kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik. Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
A	Program PelayananIzin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang bankable	Rp. 210.094.650	Rp. 209.808.840	99,86
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	Rp. 201.362.650	Rp. 201.143.840	*99,89*
a	FasilitasiIzin Usaha SimpanPinjamuntukKoperasidengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlahkoperasi yang difasilitasiuntukmemperolehizinusahasimpanpinjam	Rp. 201.362.650	Rp 2.209.808.840	99,89
2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	Rp. 8.732.000	Rp 8.665.000	*99,23*
a	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	Rp. 8.732.000	Rp 8.665.000	99,23

B	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	Rp. 130.404.106	Rp 115.346.945	88,45
1	Pemeriksaan dan PengawasanKoperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlahkoperasi yang akuntabel	Rp. 113.392.496	Rp 104.667.895	*92,31*
a	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntable	Rp. 58.682.148	Rp 50.215.348	85,57
b	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	Rp. 54.710.348	Rp 54.452.547	99,53
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan injam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel	Rp. 17.011.610	Rp 10.679.050	*62,78*
a	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	Rp. 17.011.610	Rp 10.679.050	62,78
C	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi	Rp. 60.074.198	Rp 58.738.398	97,78

1	Penilaian Kesehatan KoperasiSimpanPinjam/Unit SimpanPinjamKoperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuhsehat dan mandiri	Rp. 60.074.198	Rp 58.738.398	*97,78*
a	Penilaian Permodalan, Kualitas AktivaP roduktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Rp. 48.000.248	Rp 47.390.498	98,73
b	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasinivoProvinsi yang Sehat	Rp. 12.073.950	Rp 11.347.900	93,99
D	Program Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatpembiayaan dan bermitradengan BUMN, BUMD/Swasta	Rp. 312.664.305	Rp 293.861.990	93,99
1	Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengakses modal kelembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Rp. 312.664.305	Rp 293.861.990	*93,99*
a	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumla koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Rp. 157.009.339	Rp 156.617.244	99,75
		Jumlah Koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan			
		Jumlah koperasi yang mengikuti kemitaan			

		Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal			
b	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	Rp. 155.654.966	Rp 137.244.746	88,17
		Jumlah koperasi nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya			
		Jumlah Koperasi tenun yang aktif			
		Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan			
		Jumlah subak sebagai koperasi tani			
E	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Rp. 3.706.960.106	Rp 3.036.733.273	81,92
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	Rp. 3.706.960.106	Rp 3.036.733.273	*81,92*
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten	Rp. 3.706.960.106	Rp 3.036.733.273	81,92
F	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Bankable	Rp. 450. 154.890	Rp 446.845.380	99,26

1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, PenguatanKelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	Rp. 450. 154.890	Rp 446.845.380	*99,26*
a	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan LapanganKerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	Rp. 450. 154.890	Rp 446.845.380	99,26
		Jumlah UMKM yang melalukan kerjasama/kesepakatan			
		Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha			
		Jumlah UMKM yang Meningkat usahanya			
G	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Rp 12.855.952.250	Rp 11.725.071.149	91,20
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keselarasan program/kegiatan sesuai visi misi kepala daerah	Rp 107.148.786	Rp 91.432.296	*85,33*
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	Rp 79.387.836	Rp 78.422.546	98,78
b	Koordinasi dan penyusunandokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Rp 8.978.990	Rp 7.279.700	81,07
c	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 3.374.760	Rp -	-
d	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Rp 3.374.900	Rp 2.007.050	59,47

e	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp 3.374.730	Rp -	-
f	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	Rp 5.242.910	Rp 985.000	18,79
g	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah program yang dievaluasi	Rp 3.414.660	Rp 2.738.000	80,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaiakan tepat waktu	Rp 10.178.280.164	Rp 9.436.382.044	*92,71*
a	Penyediaangaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	Rp 10.157.693.234	Rp 9.424.070.886	92,78
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasikeuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	Rp 7.235.500	Rp 4.806.859	66,43
c	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Rp 2.135.310	Rp 1.513.600	70,88
d	Koordinasi dan penyusunan laporan keuanganbulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Rp 11.216.120	Rp 5.990.699	53,41
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan adminitrasi perkantoran	Rp 128.703.820	Rp 94.068.306	*73,09*
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang baik	Rp 13.636.650	Rp 12.339.580	90,49
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	Rp 64.487.170	Rp 51.173.979	79,36

c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang baik	Rp 21.850.000	Rp 10.487.497	48,00
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang baik	Rp 7.000.000	Rp 4.656.000	66,51
e	Fasilitasi KunjunganTamu	-	Rp -	Rp -	-
f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaiakan tepat waktu	Rp 21.730.000	Rp 15.411.250	70,92
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase layanan administrasi perkantoran	Rp 141.481.000	Rp 121.710.250	*86,03*
a	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana pendukung yang diadakan	Rp 141.481.000	Rp 121.710.250	86,03
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaiakan tepat waktu	Rp 1.297.634.752	Rp 1.182.776.520	*91,15*
a	Penyediaan jasa surat-menyurat	Jumlah layanan penyediaan surat-menyurat yang baik	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100,00
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 271.200.000	Rp 157.713.768	58,15
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang baik	Rp 1.024.434.752	Rp 1.023.062.752	99,87

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	Rp 1.002.703.728	Rp 798.701.733	*79,65*
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	Rp 779.379.736	Rp 621.324.456	79,72
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	Rp 50.000.000	Rp 17.240.000	34,48
c	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Rp 173.323.992	Rp 160.137.277	92,39

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021s ebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021

NO	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021			Realisasi Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1.Persentase peningkatan produktivitas	6,27%	7,68%	122	Rp. 713.237.259	Rp. 677.756.173	95,03	99,22%
		2. Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	50	117	234	Rp. 3.706.960.106	Rp. 3.036.733.273	81,92	99,64%
2	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1.Rasio Kewirausahaan	8,38%	9,55%	113	Rp. 450.154.890	Rp. 446.845.380	99,26	99,12%

Pencapaian Sasaran pada Tahun 2021 merupakan pencapaian kinerja tahun ketiga periode Renstra 2018-2023. Secara umum anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan sangatlah kurang mengingat refocusing anggaran yang telah dilaksanakan demi percepatan penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang tersisa hanya digunakan untuk membayar tenaga honorer (Non ASN). Namun dalam pemenuhan capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, berusaha maksimal dengan menggunakan anggaran yang tersisa dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehingga capaian dari sasaran strategis dapat dipenuhi dengan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan ekspor
b. Penguatan substitusi impor
c. UMKM dan Koperasi masuk dalam rantai pasok global (Global Value Chain)

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :

1. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas koperasi dan UMKM di Bali.
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan dalam peningkatan kelas usaha koperasi dan UMKM.
4. Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan.
5. Masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Bali.

Adapun Isu-isu yang berkembang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya
b. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan
c. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha
d. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan Koperasi dan UKM jalan di tempat.

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mampu mengatasi hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat daerah yaitu :
   - Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi
   - Meningkatkan penumbuhan dan pengembangan KUKM dengan melaksanakan penyuluhan perkoperasian, bimtek/diklat perkoperasian dan kewirausahaan serta peningkatan akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil Koperasi dan UKM.
   - Meningkatkan dalam memfasilitasi akses permodalan dan fasilitasi pameran dalam kemitraan usaha dengan BUMD/BUMN.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :
   - Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
   - Terbatasnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses permodalan/pembiayaan, akses informasi pasar dan jaringan pemasaran.
   - Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.

- Rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi para pelaku UKM. Sebagian besar UKM belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
- Rendahnya pertumbuhan usaha dan daya saing UMKM.
- Digitalisasi informasi dan komunikasi yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha mikro.

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*) : Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program prioritas di tahun 2021 dalam upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam membuka lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berdampak di berbagai sektor, yaitu :
   - Sub kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha yang berdampak langsung kepada Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya yaitu adanya dana penguatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu Lembaga Penjaminan Kredit Bali Mandara serta memperluas pemasaran produk bagi UMKM.
   - Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi yang berkualitas sehat akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan mendorong pembentukan koperasi sektor riil.
   - Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan dengan sub kegiatan ini dapat mewujudkan tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor koperasi dan UMKM dan kemitraan UMKM.
   - Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

berdampak berdampak terhadap pelaku KUMKM untuk mendapatkan sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :

Koperasi dan UKM dapat disebut sebagai gambaran pondasi dasar ekonomi bangsa Indonesia karena mempunyai dasar azas kekeluargaan, akan tetapi kondisi saat ini tidak mudah menjalankan kegiatan perkoperasian di Indonesia. Lingkungan dihadapi koperasi pun beragam pada era globalisasi ini yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu analisis internal dan analisis eksternal.

a. Analisis Internal

- **Kekuatan (*strength*)**
  - Adanya Peraturan Perundang-undangan dibidang Perkoperasian dan UKM.
  - Bali sebagai Provinsi Penggerak Koperasi menunjukkan bahwa koperasi memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.
- **Kelemahan (*Weakness*)**
  - Kualitas SDM pengelola koperasi masih rendah.
  - Akses permodalan Koperasi dan UKM masih kurang.
  - Pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM terbatas.
  - Masih tingginya orientasi pendirian Koperasi Simpan Pinjam

b. Analisis Eksternal

- **Peluang (*Oppurtunity*)**
  - Adanya pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi dan UMKM.
  - Adanya fasilitasi/sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/pembiayaan.
  - Adanya fasilitasi pengembangan jaringan/kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi.
- **Ancaman (*Treath*)**
  - Adanya kasus-kasus koperasi dan koperasi tidak aktif.
  - Adanya gangguan dari para tengkulak.

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- Program dan kegiatan direncanakan/disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi.
- Program dan kegiatan disusun disesuaikan dengan kesanggupan APBD Daerah.

- Penyesuaian indikator kinerja program sesuai hasil kinerja yang diinginkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Selama proses tahapan-tahapan penyusunan dokumen perencanaan, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengalami perubahan baik dari sisi jumlah program dan kegiatan maupun dari besarnya penganggaran. Perbedaan nama dan jumlah program dan kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Perangkat Daerah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal Pebruari 2022**,** ada beberapa usulan masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut:

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis dimasukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2.16.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pemulihan Ekonomi bagi Pelaku Koperasi dan UKM	-	-	--	Usulan yang disampaikan pada saat forum Perangkat Daerah sudah terakomodir pada beberapa Program yang ada pada Dinas, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
-	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	-	-	--	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Sasaran Pembangunan Nasional periode 2020-2024 Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM RI periode 2020-2024 sebagai berikut:

Visi : “”Terwujudkan Koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi : Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing):

Tujuan :

- Modernisasi Koperasi
- Melahirhan entrepreneur baru
- Integrasi UMKM dalam *Global Value Chain* (GVC)
- Scaling *Up* UMKM

Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional serta prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sehingga ada keterpaduan antara prioritas pembangunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjawab dengan program unggulan yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, visi misi Kepala Daerah Provinsi Bali beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM menuju digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu :

a. Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel
   Indikator : 1. Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi

b. Sasaran 2 : Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri
   Indikator : Rasio Kewirausahaan

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan dengan menyesuaikan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
a.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
b.	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
5.	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
a.	Penyediaan jasa surat menyurat
b	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6.	**Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
B.	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**
1	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**
a.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2.	**Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**
a.	Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
C.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**
1	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
a.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
2	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
a.	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
D.	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
1.	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
a.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
E.	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
1.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
a.	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Stardarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
b.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
F.	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**
1.	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
a.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
G.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
1.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3.	**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
a.	Penyediaan jasa surat menyurat
b.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
4.	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
H.	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
1.	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	JUMLAH PROGRAM : 8
	JUMLAH KEGIATAN : 18
	JUMLAH SUB KEGIATAN : 36

Berdasarkan tabel di atas Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 berjumlah 8 (delapan) dengan kegiatan berjumlah 18 (delapan belas), dan sub kegiatan berjumlah 36 (tiga puluh enam).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2023 seperti terlampir dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp17.891.871.992,00 (Tujuh Belas milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian pagu indikatif untuk **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali** sebesar Rp17.359.576.360,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah); **UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** sebesar Rp532.295.632,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting dipedomani untuk memberi arah bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dimasing-masing Perangkat Daerah Provinsi Bali. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah merupakan dokumen strategis tahunan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, lebih lanjut akan menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator dan target yang telah tercantum.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Lampiran 1

Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat derah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat derah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	Indikator		5				9		
1				2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
-	01			Koperasi dan UKM										
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	**Jumlah koperasi yang bankable**	**Persentase koperasi yang bankable**	**83,33**	64	64	64	**100%**	71 koperasi		
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin usaha**			64	64	64	100%	71 koperasi		
				Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam			10	10	10	100%	71 koperasi		
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor Kas**			5	5	5	100%	5 koperasi		

				Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang			1	1	1	100%	5 koperasi		
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas**	**Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas**	**-**	**45**	**130**	**45**	**34,62%**	-		
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah koperasi yang akuntabel**			**28**	**85**	**28**	**62,22%**	**-**		
				Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntabel			7	30	7	23,33%	-		
				Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian			21	55	21	38,18%	-		
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntabel**			**17**	**45**	**17**	**37,78%**	**-**		
				Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota Masyarakat	Jumlah KSP/USP yang akuntabel			17	35	17	48,57%			
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Jumlah KSP/USP Koperasi**	**Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas**	**78,89**	**63**	**130**	**63**	**48,46%**			

				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri**			**63**	**130**	**63**	**48,46%**			
				Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri			11	30	11	36,67%			
				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat			100	100	52	52%			
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta**	**Persentase koperasi/koperasi tenun/koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN. BUMD/Swasta**	**3,08**	**126**	**126**	**126**	**100%**			
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang mengakses modal ke Lembaga keuangan dan bermitra dengan Lembaga lainnya			126	126	33	26,19%			
				Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta			10	10	10	100%			
					Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan			10	10	10	100%			
					Jumlah koperasi yang mengikuti kemitraan			10	10	10	100%			
					Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal			3	3	3	100%			
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang berprestasi			15	15	15	100%			

					Jumlah Koperasi Nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat asset dan omsetnya			64	64	64	100%			
					Jumlah koperasi tenun yang aktif			1	1	1	100%			
					Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan			30	30	94	313,33%			
					Jumlah subak sebagai koperasi tani			1	1	1	100%			
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat**	**Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat**	**0,24**	**50**	**50**	**117**	**234%**			
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan			50	50	990	1.980%			
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten			990	990	873	88,18%			
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	**Jumlah UMKM yang bankable**	**Persentase UMKM yang bankable**	**0,12**	**185**	**185**	**1.744**	**942,70%**			
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya			185	185	425	229,73%			
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha			50	50	325	650%			
					Jumlah UMKM yang melalukan kerjasama/kesepakatan			4	4	11	275%			

					Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha			50	50	558	1.116%			
					Jumlah UMKM yang Meningkat usahanya			32	32	425	1.328,13%			

REKAP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
TAHUN BERJALAN (2022)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PERSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (RP)	PERMASALAHAN & UPAYA PEMECAHAN KETERANGAN LAIN
				FISIK		KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.417.006	35.494.020	53,48	52,21	53,48	45,26	42.922.986	-
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.213.010	1.983.800	100,00	100	100,00	89,64	229.210	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.255.730.998	6.177.561.267	52,87	49,9	52,87	43,33	8.078.169.731	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.250	9.585.873	100,00	100	100,00	95,87	413.377	-
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.931.520	31.588.276	54,57	48,65	54,57	48,65	33.343.244	-
6	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.965.000	7.266.175	59,49	48,55	59,49	48,55	7.698.825	-
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	2.910.000	50,00	50	50,00	41,57	4.090.000	-
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	100	100,00	100,00	-	-
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.200.000	72.203.814	51,99	50	51,99	26,62	198.996.186	-
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.911.200	470.033.000	50,29	50,24	50,29	44,26	591.878.200	-
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	729.460.536	366.629.460	62,71	53,53	62,71	50,26	362.831.076	-

12	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	15.320.000	63,67	39,92	63,67	30,64	34.680.000	-
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.844.492	82.306.606	53,89	51,41	53,89	45,77	97.537.886	
14	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17.956.000	11.467.980	100,00	65,78	100,00	63,87	6.488.020	-
15	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pebantu dan Kantor Kas Koerasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	237.108.240	85.944.150	53,26	44,82	53,26	36,25	151.164.090	-
16	Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.896	62.078.590	59,23	56,85	59,23	52,36	56.474.306	-
17	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataaan anajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	315.246.554	200.819.460	66,66	66,66	66,66	63,70	114.427.094	-
18	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Stndarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	153.617.736	56.704.830	65,49	39,45	65,49	36,91	96.912.906	-
19	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	609.048.900	217.196.700	51,68	39,86	51,68	35,66	391.852.200	-
20	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.396.000	0	54,09	100,00	54,09	0,00	64.396.000	-
21	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	689.500	376.500	100,00	100,00	100,00	54,60	313.000	-

	Bangunan Kantor								
22	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.726.720	2.521.965	100,00	100,00	100,00	92,49	204.755	-
23	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	530.000	100,00	53,00	100,00	53,00	470.000	-
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000	9.200.781	50,07	50,00	50,07	18,97	39.299.219	-
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.952.392	104.076.205	57,94	60,27	57,94	54,79	85.876.187	-
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pmeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.784.448	37.260.520	56,68	41,55	56,68	38,90	58.523.928	-
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.270.000	3.124.000	100,00	100,00	100,00	95,54	146.000	-
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.952.896	32.397.040	51,33	50,00	51,33	43,22	42.555.856	-
30	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Kompetensi SDM koperasi	3.844.528.896	1.584.288.758	69,40	44,06	69,40	41,21	2.260.240.138	-
	Total	**22.441.608.190**	**9.683.869.770**	**56,37**	**49,02**	**56,37**	**43,15**	**12.757.738.420**	-

Lampiran 2

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (000)**	**Program / Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (000)**	**Catatan Penting**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***		***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	***84***	***16.138.762.224,00***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***		***Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja***	***84***	***18.954.991.102,00***	
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusundan disampaikan tepat waktu		**84.661.517,00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu**	**3 dokumen**	**90.363.500,00**	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	82.337.856,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	85.000.000,00	
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	2.323.661,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	5.363.500,00	
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan**		**13.543.223.108,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan**		**15.165.630.283,00**	

			disampaikan tepat waktu					**disampaikan tepat waktu**			
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan ASN	64 orang	13.543.223.108,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjungan ASN	75 orang	15.165.630.283,00	
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik**		**101.740.559,00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik**		**379.390.559,00**	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.499.213,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.499.213,00	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	68.178.096,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	68.178.096,00	
c.	-	-	-	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	125.000.000,00	
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	15.713.250,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	15.713.250,00	
e.	-	-	-	-	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	10.000.000,00	
f.	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	7.350.000,00	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	150.000.000,00	

4.	-	-	-	-	-	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350.000.000,00**	
a.	-	-	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 unit	300.000.000,00	
b.	-	-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	50 unit	50.000.000,00	
5.	**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**1.401.866.760,00**	**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**1.417.106.760,00**	
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.100.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.100.000,00	
b	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	284.760.000,00	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	300.000.000,00	
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.115.006.760,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.115.006.760,00	
6.	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat**		**1.007.270.280,00**	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**		**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan**		**1.552.500.000,00**	

			waktu			**pemerintahan daerah**		**tepat waktu**			
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	765.933.563,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	800.000.000,00	
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	76 unit	52.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	76 unit	52.500.000,00	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	188.836.717,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	700.000.000,00	
B.	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**		**Persentase koperasi yang bankable**	**86,49%**	**267.817.452,00**	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**		**Persentase koperasi yang bankable**	**86,49%**	**285.000.000,00**	
1	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**		**Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan**		**18.853.800,00**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**		**Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan**		**25.000.000,00**	
a.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12 unit usaha	18.853.800,00	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12 unit usaha	25.000.000,00	

		kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	yang memiliki usaha simpan pinjam			lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	yang memiliki usaha simpan pinjam			
2.	**Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**		**Jumlah izin usaha pembukaan kantor cabang yang diterbitkan**		**248.963.652,00**	**Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk**		**Jumlah izin usaha pembukaan kantor cabang yang diterbitkan**		**260.000.000,00**	

						koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.					
a.	Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3 unit usaha	**248.963.652,00**	Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3 unit usaha	**260.000.000,00**	

		(semua kecamatan, semua kelurahan)									
C.	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**		**Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas**		**50.000.000,00**	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**		**Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas**		**50.000.000,00**	
1.	**Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaaanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**		**Jumlah koperasi yang akuntabel**		**20.000.000,00**	**Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaaanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**		**Jumlah koperasi yang akuntabel**		**20.000.000,00**	
a.	Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat , mandiri, tangguh, serta akuntable	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, Tangguh serta akuntabel	55 unit usaha	20.000.000,00	Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat , mandiri, tangguh, serta akuntable	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, Tangguh serta akuntabel	55 unit usaha	20.000.000,00	

		kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					kelurahan)				
2.	**Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**		**Jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel**		**30.000.000,00**	**Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**		**Jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel**		**30.000.000,00**	

a.	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah koperasi yang akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan pemberian manfaat kepada anggota KUKM dan masyarakat	35 unit usaha	30.000.000,00	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah koperasi yang akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan pemberian manfaat kepada anggota KUKM dan masyarakat	35 unit usaha	30.000.000,00	

D.	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**		**Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas**	**87,22%**	**124.480.541,00**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**		**Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas**	**87,22%**	**124.480.541,00**	
1.	**Kegiatam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya**		**124.480.541,00**	**Kegiatam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya		**124.480.541,00**	
a.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem	Jumlah koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	100 unit usaha	124.480.541,00	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	100 unit usaha	124.480.541,00	

		(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)									
E.	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**		**Persentase koperasi/koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta**	**3,13%**	**442.307.505,00**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**		**Persentase koperasi/koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta**	**3,13%**	**444.007.478,00**	
1.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi**		**442.307.505,00**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi**		**447.007.478,00**	
a.	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Stardarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha	60 unit usaha	331.008.882,00	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Stardarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab.	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha	60 unit usaha	331.008.882,00	

		(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)				
b.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar	Jumlah Koperasi Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	64 unit usaha	111.298.623,00	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua	Jumlah Koperasi Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	64 unit usaha	112.998.596,00	

		(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)				
F.	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**		**Persentase UMKM yang bankable**	**0,13%**	**639.501.345,00**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**		**Persentase UMKM yang Bankable**	**0,13%**	**639.501.345,00**	
1.	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid**		**639.501.345,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi**		**Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid**		**639.501.345,00**	

						dengan Para Pemangku Kepentingan					
a.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua	Jumlah unit usaha UMKM yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	195 unit usaha	639.501.345,00	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah unit usaha UMKM yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	195 unit usaha	639.501.345,00	

		kecamatan, semua kelurahan)									
G.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**1.864.064.194,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**2.072.743.429,00**	
1.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**1.425.294.440,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**1.622.407.175,00**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	9 orang	1.425.294.440,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	9 orang	1.622.407.175,00	
2.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**4.637.031,00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**4.637.031,00**	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	723.975,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	723.975,00	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2.863.056,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2.863.056,00	

c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.050.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.050.000,00	
3.	**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**251.425.012,00**	**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**		**251.425.012,00**	
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.050.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.050.000,00	
b.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	50.925.000,00	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	50.925.000,00	
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	199.450.012,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	199.450.012,00	
4.	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara**		**182.707.711,00**	**Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara**		**194.274.211,00**	
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	100.573.670,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	100.573.670,00	

b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	3.433.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	15.000.000,00	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	78.700.541,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	78.700.541,00	
H.	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**		**Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan besertifikat**	**0,30%**	**4.036.755.341,00**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**		**Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat**	**0,30%**	**4.036.755.341,00**	
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten		**4.036.755.341,00**	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten		4.036.755.341,00	
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	990 orang	**4.036.755.341,00**	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	990 orang	4.036.755.341,00	

Lampiran 3

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**27.359.576.360**					**21.768.315.660**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**15.948.049.104**					**20.149.212.766**
2	**17**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**86.172.896**					**96.000.000**
2	17	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		80.809.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90.000.000
2	17	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		5.363.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.000.000
2	**17**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13.371.905.680**					**15.326.015.680**

2	17	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Orang		13.371.905.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.326.015.680
2	**17**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**284.175.700**					**424.110.086**
2	17	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		9.999.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.024.173
2	17	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		51.511.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				71.587.000
2	17	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150.000.000
2	17	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		12.187.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16.498.913
2	17	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.000.000

2	17	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		100.977.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				160.000.000
2	**17**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**56.950.800**					**725.000.000**
2	17	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Unit		56.950.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450.000.000
2	**17**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.210.102.200**					**1.522.962.000**
2	17	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.991.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.205.000
2	17	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		271.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350.000.000
2	17	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		936.911.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.170.757.000
2	**17**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**938.741.828**					**2.055.125.000**
2	17	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		717.249.536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				950.000.000

2	17	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76 Unit		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				155.125.000
2	17	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		171.492.292	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				950.000.000
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**								**275.064.140**					**300.000.000**
2	**17**	**02**	**1,01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**27.956.000**					**30.000.000**

2	17	02	1,01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		12 Unit Usaha		27.956.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30.000.000

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	**17**	**02**	**1,02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**247.108.140**					**270.000.000**	

2	17	02	1,02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		3 Unit Usaha		247.108.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				270.000.000	

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**49.999.800**					**52.500.000**	
2	**17**	**03**	**1,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**19.999.800**					**21.000.000**	

2	17	03	1,01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		55 Unit Usaha		19.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21.000.000	

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	**17**	**03**	**1,02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**30.000.000**					**31.500.000**	

2	17	03	1,02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		35 Unit Usaha		30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31.500.000	

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**118.552.496**					**130.704.568**	
2	**17**	**04**	**1,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**118.552.496**					**130.704.568**	

2	**17**	**04**	**1,01**	**02**	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		100 Unit Usaha		118.552.496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130.704.568	

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**327.995.940**					**464.422.326**	
2	**17**	**06**	**1,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**327.995.940**					**464.422.326**	

2	17	06	1,01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		60 Unit Usaha		204.997.544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				347.559.326	

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										

2	17	06	1,01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		64 Unit Usaha		122.998.396	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				116.863.000	

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**10.639.914.880**					**671.476.000**	
2	**17**	**07**	**1,01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**								**10.639.914.880**					**671.476.000**	

2	17	07	1,01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua		195 Unit Usaha		10.639.914.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				671.476.000	

									Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
TOTAL													**27.359.576.360**					**21.768.315.660**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**532.295.632**					**4.715.694.174**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**417.348.336**					**477.101.174**
2	**17**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**4.392.300**					**4.868.674**
2	17	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		666.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				760.174
2	17	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		2.725.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.006.000
2	17	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.102.500
2	**17**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**239.372.292**					**263.995.500**

2	17	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1.001.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.102.500
2	17	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		48.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53.471.000
2	17	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		189.871.292	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				209.422.000
2	**17**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**173.583.744**					**208.237.000**
2	17	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		95.780.848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105.602.000
2	17	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit		2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20.000.000
2	17	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		74.952.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82.635.000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**114.947.296**					**4.238.593.000**
2	17	05	1,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								114.947.296					4.238.593.000

2	17	05	1,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Kota Denpasar, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		50 Orang		114.947.296	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4.238.593.000
TOTAL													**532.295.632**					**4.715.694.174**